

## KONTRIBUSI DANA BOS TERHADAP SISWA MISKIN DI LIMA SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR

Sa'diyah el Adawiyah, Darmanto,  
Abdullah Ubaid, Aip Sarifudin  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  
Email: diyah\_adawiyah@yahoo.co.id

**Abstrak:** *Tingginya alokasi APBN dalam sektor pendidikan tersebut ternyata belum membantu meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Saat ini di Indonesia masih ada sekitar 465.500 anak usia 7-12 tahun yang belum masuk SD, dan 1,2 juta anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SMP. Angka putus sekolah di jenjang SD mencapai 13 persen. Tujuan penelitian: 1) Mengetahui kontribusi dana BOS terhadap siswa miskin di sekolah swasta di Jakarta Timur. 2) Mengetahui ketepatan alokasi dana BOS bagi siswa miskin di sekolah swasta di Jakarta Timur. 3) Mengetahui peran orang tua siswa dalam pelaksanaan program BOS pada sekolah swasta di Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif di 5 sekolah swasta miskin Cakung Jakarta Timur.*

**Kata Kunci:** *Dana BOS, Siswa Miskin, Sekolah Swasta*

**Abstract:** *The high Budget allocation in the education sector it is still not helping to improve access and quality of education. Currently in Indonesia there are about 465 500 children aged 7-12 years who have not entered elementary school, and 1.2 million children aged 13-15 who are not in junior high school. The dropout rate in elementary schools reached 13 percent. Objective: 1) Knowing the contribution of BOS funds to poor students in private schools in East Jakarta. 2) Determine the accuracy of the allocation of BOS funds for poor students in private schools in East Jakarta. 3) Knowing the role of parents in the implementation of the BOS program at the private school in East Jakarta. The study uses quantitative methods in five poor school swasta Cakung, East Jakarta.*

**Keywords:** *BOS funds, Poor Students, Private Schools*

### Latar Belakang

Anggaran BOS merupakan skema keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menutupi pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS

diberikan kepada semua sekolah, baik negeri maupun swasta, pada jenjang pendidikan SD dan SMP di seluruh provinsi di Indonesia. Secara khusus program BOS bertujuan untuk (1) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah, (2) membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dana BOS bila digunakan secara efektif akan membantu keluarga miskin dalam memperoleh hak-hak pendidikannya sehingga keluarga siswa miskin tidak perlu membiayai lagi berbagai keperluan pendidikan yang sudah didanai melalui skema BOS. Ironisnya, secara faktual berbagai pungutan masih terjadi. Berbagai alasan untuk memungut uang dari masyarakat masih sering terdengar. Pungutan ini semakin meningkat semenjak dikeluarkannya Permendikbud No. 101 Tahun 2014 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan yang membolehkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memungut biaya dari masyarakat dalam rangka memenuhi kekurangan biaya operasional. Pungutan seperti ini semakin memberatkan masyarakat,

terutama masyarakat miskin yang bersekolah di sekolah swasta. Menurut analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), Permendikbud tersebut berpotensi melegalkan berbagai macam pungutan bagi sekolah swasta penerima dana BOS. Mekanisme sistem transparansi keuangan belum berkembang di sebagian sekolah swasta. Ini akan membuat transparansi keuangan di sekolah semakin sulit untuk diawasi. Adanya persoalan transparansi keuangan bisa menjadi indikasi adanya penyelewengan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga program ini salah sasaran. Bila terjadi indikasi penyelewengan program BOS, akan ada dua pihak yang dirugikan. Pertama, maksud baik dan tujuan mulia pemerintah agar rakyatnya mengenyam pendidikan gratis tidak terwujud, karena ketidaktepatan penggunaan dana BOS. Kedua, kesempatan bagi rakyat miskin mengenyam pendidikan gratis hilang karena dana BOS tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Kondisi seperti ini akan menambah beban keluarga miskin mengingat

mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sekaligus keberlanjutan sekolah anak-anak mereka.

Program BOS yang menjadi kajian penelitian ini merupakan salah satu pilar utama dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun. Bila ditilik dari awal sejarah kelahiran program BOS, BOS muncul pada 2005 ketika Negara mengalami krisis energi sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan-bakar minyak. Akibatnya, harga-harga naik dan banyak orang masuk dalam kategori orang miskin. Kenaikan harga BBM yang diikuti dengan dikurangnya subsidi dari pemerintah membuat pemerintah ingin mengalokasikan dana anggaran subsidi ke bidang lain. Sebagai dampak kenaikan BBM dan pengurangan subsidi dari Pemerintah Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT).

Program BOS menjadi salah satu target kompensasi subsidi BBM.

Sasaran umum BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus sasaran BOS adalah (1) membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang sekarang sudah dibubarkan, dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih, (2). Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, (3). Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.

Sejak diluncurkannya program BOS 2005 hingga sekarang telah terjadi beberapa perubahan kebijakan. Perubahan itu terjadi karena beberapa hal, pertama Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan

hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kedua, adanya peningkatan nominal jumlah dana BOS tahun 2012 sekitar 40 % dari BOS 2011 (Rp 16,3 T - Rp 23,5 T). Ketiga, untuk dapat memastikan prinsip pengelolaan sekolah agar program Wajib Belajar 9 tahun berjalan dengan baik.

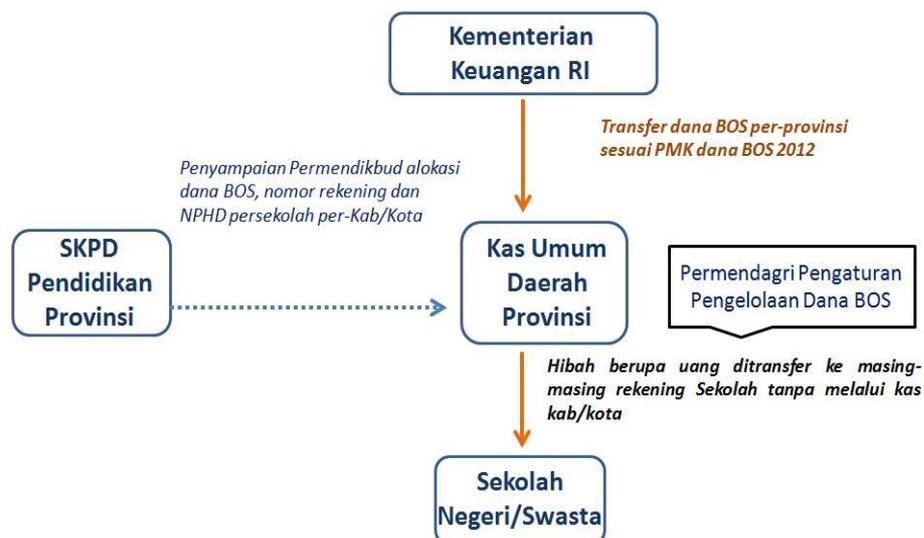
### Implementasi penyaluran Dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis

penggunaan danaBOS tahun 2011, disebutkan ada 3 kementerian yang berperan dalam penyaluran dana bos, yaitu kemendikbud (kemenag), kemendagri dan kementerian keuangan. Hal ini berbeda dengan penyaluran danaBOS sebelumnya dimana hanya ada dua kementerian yang berperan dalam penyaluran dana BOS, yaitu Kemendibud untuk program BOS yang diperuntukkan bagi sekolah negeri dan swasta dan kementerian agama yang bertanggung jawab terhadap sekolah agama, madrasah dan pesantren salafiah baik negeri maupun swasta.

Gambar 1.

### MEKANISME PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2012



Menurut Buku panduan BOS 2014, biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik. Karena itu, mulai tahun 2014 jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan mejadi dua kelompok sekolah, sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap). BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
  - a. SD/SDLB : Rp 580.000,- /peserta didik/tahun
  - b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 710.000,-/peserta didik/tahun
2. Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap), agar pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, pemerintah memberikan dana BOS bagi sekolah setingkat SD dengan jumlah peserta didik kurang dari 80 peserta didik dan

SMP yang kurang dari 120 peserta didik sebanyak 120 peserta didik. Akan tetapi kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut biaya mahal.
- b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya.
- c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam tujuan program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus sekolah karena alasan financial.
3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;
5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak mampu.

### Penggunaan Dana BOS

Alokasi dana BOS yang diperoleh sekolah di antaranya digunakan, sebagai berikut: (Tabel 2).

Tabel 2. Komponen dan Item Pembiayaan Dana BOS

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan
1	Pengembangan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain. Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi peserta didik untuk semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-</li> </ul>

		<p>Desember 2014) sebanyak jumlah peserta didik, kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain. Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta didik satu buku</p> <p>Langganan publikasi berkala Akses informasi <i>online</i> Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan Pengembangan <i>database</i> perpustakaan Pemeliharaan perabot perpustakaan Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.</p>
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi pendaftaran</li> <li>• Penggandaan formulir Dapodik Administrasi pendaftaran</li> <li>• Pendaftaran ulang Biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.</li> </ul>
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAKEM (SD), pembelajaran Kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pendidikan</li> </ul>

		Lingkungan Hidup, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah.
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulangan harian, Ulangan tengah semester, Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas Ujian sekolah.</li> </ul>
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehari-hari di sekolah, pengadaan suku cadang alat kantor, alat-alat kebersihan sekolah.</li> </ul>
6	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik, air, dan telepon, internet (<i>fixed/mobile modem</i>) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru, membeli <i>genset</i> atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik.</li> </ul>
7	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas.</li> </ul>
8	Pengembangan profesi guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KKG/MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah</li> </ul>
9	Membantu peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, membeli alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin yang akan menjadi</li> </ul>

		barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll), membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau peserta didik yang orang tuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
10	Pembiayaan pengelolaan BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan <i>flash disk</i>), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos</li> </ul>
11	Pembelian dan perawatan perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian <i>Desktop/work station Printer atau printer plus scanner</i></li> </ul>
12	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat</li> </ul>

Dalam penggunaan dana BOS ada pembatasan maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20 persen dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun atau dalam priode catur wulan.

### **Kemiskinan dan Siswa Miskin**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan tidak mudah. Konsep tentang apa itu kemiskinan pun berbeda-beda dan sulit untuk dinilai (*assessed*). Kemiskinan dalam tinjauan tadisional dipahami

sebagai rendahnya pendapatan. Cara mengukur tingkat kemiskinan pun juga dilakukan dengan cara sederhana, seperti mengukur kemiskinan hanya melalui batasan-batasan kemiskinan secara angka-angka (*statistic*). Bank Dunia, misalnya menentukan kriteria pendapatan 2 US \$ per hari sebagai standar minimum garis kemiskinan. Asian Development Bank (ADB) menggunakan 1.25 US \$ per hari, dan pemerintah kita sekitar Rp. 7.060 perhari (BPS, 2011).

### **Definisi Siswa Miskin**

Kriteria kemiskinan menurut Buku Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar di antaranya mencakup gambaran tentang:

- a. Kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan (kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar).
- b. Kurangnya kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

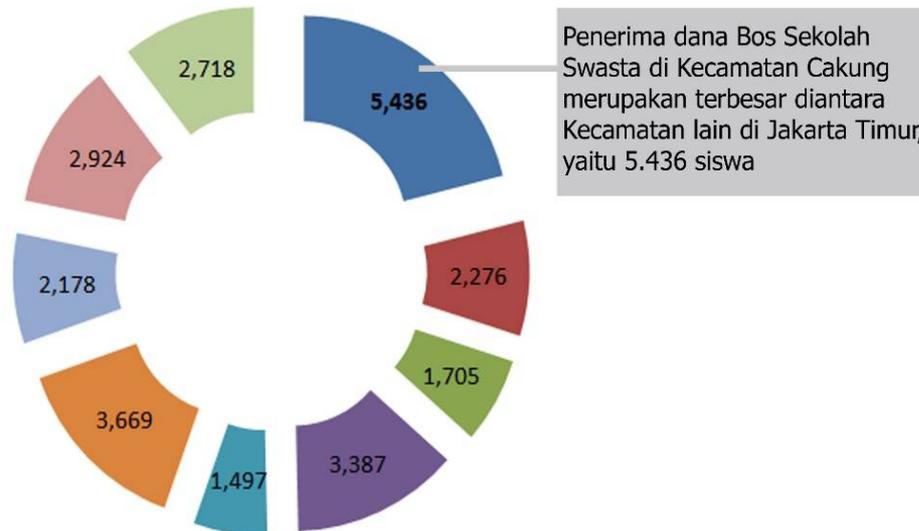
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral.

- c. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. (Sumber: diolah dari <http://id.wikipedia.org>).

### **Metodologi Penelitian**

Studi ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan Kuantitatif menggunakan metode survei dengan kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*desk study*), wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Untuk penarikan sampel dari populasi penelitian secara ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah.

### Populasi dan Metode Penarikan Sampel



Kecamatan Cakung sebagai area studi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah siswa SMP Swasta di Kecamatan Cakung mendapatkan dana BOS terbesar di banding dengan kecamatan lainnya, yaitu 5,436 (19,2%), Kramat Jati 2,276 (8.1%), Ciracas 1,705 (6.0%), Duren Sawit 3,387 (12.0%), Makasar 1,497 (5.3%), Jatinegara 3,669 (3.0%), Matraman 2,178 (7.7%), Pulogadung 2,924 (10.3%), Pasar Rebo 2,718 (9.6%), Cipayung 2,474 (8.8%). Dari data ini diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini ada 5.436

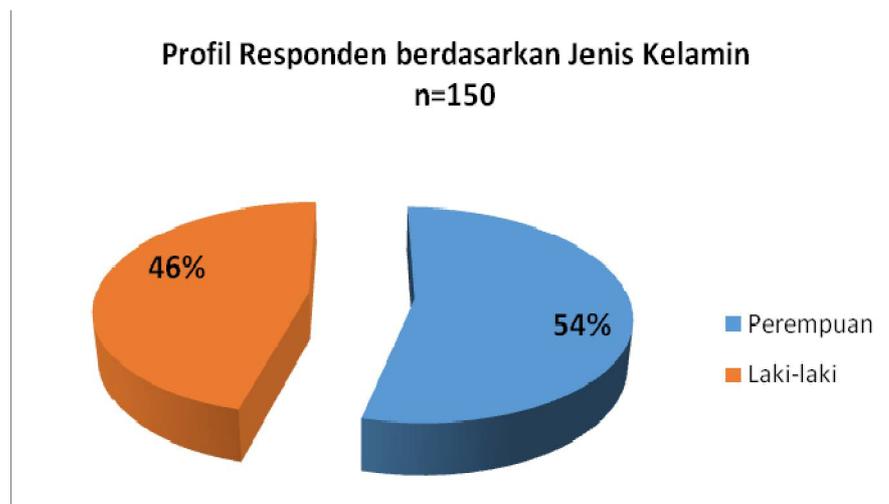
Untuk mendapatkan 5 sekolah swasta sebagai sampel yang tersebar di

145 sekolah swasta di Jakarta timur digunakan metode acak sederhana menggunakan interval 4. Dari metode acak secara sederhana ini ditemukan 5 sekolah swasta, sebagai berikut, SMP Al Falah, SMP Imtaq Darrurahim, SMP IT Nurul Ihsan, MTS AL Wathoniyah 10 dan MTS Tsaqofah Addrain. Untuk setiap sekolah diambil 30 responden secara quota. Untuk mendapatkan responden sesuai kriteria miskin, informasi diperoleh dari pihak sekolah, gambaran status sosial ekonomi orang tua dan dokumen kepemilikan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan.

### Temuan-Temuan Penelitian

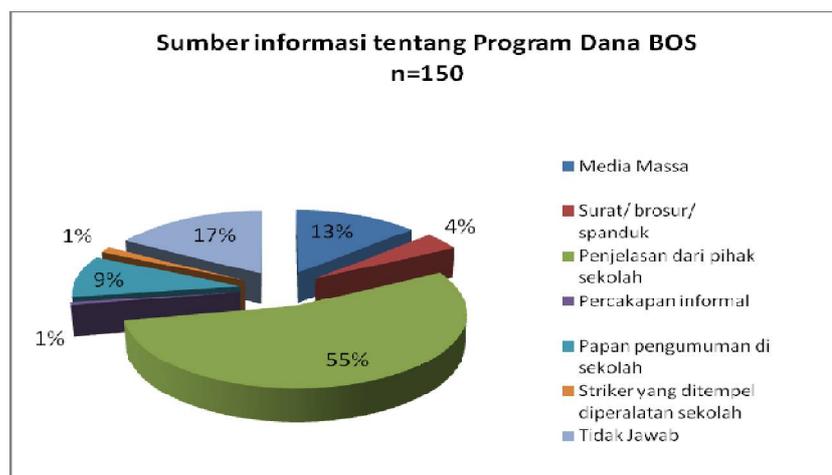
Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMP di sekolah swasta. Berdasarkan jenis kelamin responden

dalam penelitian ini terdiri dari perempuan 81 Siswa atau 54 persen, laki-laki 69 siswa (46 %)(gambar 3).



Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa yang mengetahui danaBOS ada 97 Siswa (65%), 53 siswa (35 %) mengaku tidak tahu adanya program BOS di sekolahnya (lihat gambar 5).

### Sumber informasi tentang Dana BOS



Data ini menunjukkan bahwa telah ada transparansi dari pihak sekolah, terutama terkait dengan pemberian informasi tentang keberadaan dana BOS di sekolah. Sumber informasi yang berasal dari penjelasan pihak sekolah menempati persentase terbesar. Namun, siswa yang

tidak tahu tentang keberadaan program BOS di sekolah, menyatakan bahwa mereka tahu ada program BOS melalui media massa sebesar 32 persen (lihat tabel8). Ini menunjukkan bahwa gencarnya pemberitaan media massa akan membantu proses sosialisasi program BOS.

Tabel 8. Cross Tabel Kaitan pengetahuan siswa dan sumber informasi tentang dana BOS

		Sumber Informasi							Total
		Media Massa	Surat/ brosur/ spanduk	Penjelasan dari pihak sekolah	Percakapan informal	Papan pengumuman di sekolah	Striker yang ditempel diperalatan sekolah	Tidak Jawab	
Pengetahuan tentang Program Bos	Ya	3 3.1%	5 5.2%	73 75.3%	0 .0%	13 13.4%	2 2.1%	1 1.0%	97 100.0%
	Tidak	17 32.1%	1 1.9%	9 17.0%	1 1.9%	1 1.9%	0 .0%	24 45.3%	53 100 %
Total		20	6	82	1	14	2	25	150
		13.3%	4.0%	54.7%	.7%	9.3%	1.3%	16.7%	100 %

Untuk mengukur ketepatan penggunaan BOS, penelitian ini hanya mendeskripsikan beberapa komponen biaya yang seharusnya ada dalam pengelolaan BOS di sekolah. Komponen biaya tersebut meliputi 12 komponen, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru,

kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan Ulangan dan Ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer

### **Ketersediaan dan akses Buku Mapel**

Dari data yang diperoleh tentang ketersediaan buku pelajaran di sekolah, umumnya siswa menjawab bahwa di sekolah terdapat buku-buku pelajaran (93 persen), sementara yang menjawab tidak relatif kecil, yaitu 7 persen. Ini berarti masih ada sekolah swasta penerima dana BOS namun tidak menyediakan buku-buku mata pelajaran untuk siswa.

Ketersediaan buku yang tinggi rupanya tidak berarti bahwa proses pengadaannya gratis. Siswa harus membayar untuk memperoleh buku mata pelajaran di sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan siswa untuk membayar ternyata lebih banyak daripada buku yang diperoleh secara gratis. Gambar 8, yaitu 83 siswa (56 %) memperoleh buku dengan cara membayar dan 66 siswa (44 %) mendapatkan buku secara gratis.

### **Biaya-Biaya yang dikeluhkan**

Sekolah telah banyak meminta pungutan kepada siswa terkait pembiayaan sekolah. Pungutan-pungutan ini telah menimbulkan

keluhan orang tua siswa. Dari 150 responden, sejumlah 31 persen (46 siswa) menyatakan pernah mendengarkan keluhan orang tua, sementara sebesar 69 persen (104 siswa) menyatakan tidak pernah mendengarkan keluhan orang tua.

Beberapa pungutan yang dikeluhkan oleh orang tua di antaranya sangat beragam, sebesar 11% (5 siswa) untuk biaya OSIS, membayar rapor 13% (6 siswa), biaya daftar ulang 6% (2 siswa), biaya SPP 24% (11 siswa), biaya LDKS 11% (11 siswa), biaya kesehatan/tes urin 4% (2 siswa), biaya ulangan 6% (2 siswa), biaya studi tour 6% (2 siswa), biaya baju ekskul 2% (1 siswa) dan sisanya anak tidak menjawab sebesar 6% (2 siswa)

### **Peranan Program BOS sekolah swasta**

Program BOS pada dasarnya dilaksanakan untuk membantu manajemen operasional sekolah. Ada 12 komponen biaya yang dapat didanai oleh BOS. Bagi sekolah swasta kehadiran BOS ini sangatlah membantu sekolah-sekolah mereka. Namun dana

BOS dirasa masih jauh dari cukup dari kebutuhan operasional, khususnya di sekolah swasta. Seperti penuturan Arif Rahman informan kepala sekolah berikut,

*“ Kalau di Yayasan kami menyumbang dana talangan untuk sekolah perbulan, sekitar 30 Jt untuk menutupi biaya operasaional. Kalau dana Bos masuk baru ditutup. Namun meskipun Dana BOS sering telat, sekolah kami tidak sampai gulung tikar “.*

Penuturan lain yang senada diungkapkan Bapak Abdul Fatah,

*“ Murid saya ada 120. Jadi kalau dengan guru 15 orang dan 2 orang TU (Tata Usaha). Kira-kira Butuh anggaran 1 bulan 20 jt. Kalau Dana BOS kira-kira kurang 10 Jt. Artinya lebih dari separo harus mencari dana dari luar. Jadi kekurangannya perlu dukungan dari orang tua. Dari kontribusi total wali murid itu paling ada sekitar 9 Juta. Dan sisanya kebetulan ada salah satu sumbangan dari LSM Kuwait yang dapat membantu 30 orang anak, per bulannya 100 rb. Dari sana kita kelola, sehingga dapat membiayai sampai sekarang. Yang menjadi kendala, dana BOS itu sering terlambat, yayasan memberikan pinjaman ke sekolah, kemudian diganti setelah dana BOS turun “.*

Secara umum informan kepala sekolah menganggap bahwa dana BOS sangat membantu mereka. Mereka menganggap bahwa sekolah swasta itu banyak menampung siswa-siswa dari golongan tidak mampu. Mereka mengakui masih meminta bayaran kepada wali murid, namun dengan beberapa keringanan atau tidak membayar SPP penuh. Tanpa memungut biaya dari orang tua mereka tidak bisa menutup biaya operasional sekolah, termasuk membayar guru-guru honorer.

## **Pembahasan**

### ***Kontribusi Dana BOS Bagi Siswa Miskin di Sekolah Swasta***

Kehadiran program BOS bagi sekolah diakui sangat mendukung penyelenggaraan proses belajar di sekolah-sekolahh khususnya sekolah swasta. Hal ini sesuai dengan tujuan Program DanaBOS, yaitu:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Dana BOS telah membantu mengurangi beban orang tua siswa. Meskipun sekolah ini telah mendapatkan dana BOS, pihak sekolah masih tetap membebaskan uang sekolah kepada setiap siswa. Hal ini disebabkan dana BOS masih kurang memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah.

Selain mendukung pengurangan, khususnya biaya SPP, dana BOS juga telah berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana proses belajar mengajar di sekolah swasta, seperti penyediaan buku mata pelajaran, perangkat komputer, LCD, dan laboratorium. Namun demikian, tetap saja ditemukan beberapa sekolah yang belum memenuhi sarana dan prasarana sesuai juknis BOS.

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi sekolah terkait BOS di antaranya, pencairan dana BOS ke sekolah sering terlambat. Hal ini membuat manajemen sekolah swasta mengalami kesulitan. Beruntung bagi sekolah swasta yang memiliki yayasan dengan dana cadangan memadai, sehingga mereka dapat menalangi pihak sekolah untuk menutup biaya operasional sekolah. Selain mendapat sumber pembiayaan dari yayasan, sekolah masih tetap menarik biaya kepada siswa, meski terkadang banyak orang tua yang menunggak membiayai sekolah anaknya.

Keterlambatan transfer dana BOS ternyata tidak saja berdampak pada sekolah swasta, namun juga orang tua siswa miskin yang seharusnya tidak dibebankan biaya sekolah. Menurut Bapak Ungkadi, keterlambatan dana BOS ini tidak semata-mata dilakukan oleh pihak pusat. Seringkali sekolah swasta tidak cepat dalam mengajukan RAPBS. Sekolah swasta juga dirasa sering belum memahami mata anggaran yang sesuai dengan juklak dan juknis bantuan. Mereka juga tidak

terbiasa menggunakan pertanggungjawaban uang dari pemerintah, akhirnya semakin muncul banyak kendala. Sebagaimana penuturannya berikut ini,

*Sekolah swasta umumnya masih bingung dalam menggunakan mata anggaran. Misalnya, kode rekening untuk ATK – harusnya untuk ATK, tetapi kadang penggunaannya terbalik-balik. Kode rekening konsumsi – digunakan juga untuk ATK. Ada temuan lain, karena menganggap dana operasional sudah cukup untuk yayasan, akhirnya dana BOS digunakan untuk uang makan*

#### ***Ketepatan alokasi Dana BOS Bagi Siswa Miskin***

Dari beberapa temuan penelitian, kehadiran dana BOS yang bertujuan salah satunya untuk membebaskan siswa, utamanya siswa miskin, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini seperti tampak dari temuan-temuan bahwa siswa masih harus membayar beberapa komponen operasional sekolah yang seharusnya telah dicakup oleh Dana BOS. Beberapa komponen biaya tersebut diantaranya biaya administrasi masuk sekolah, biaya kenaikan kelas, pembelian buku

mata pelajaran, penggunaan sarana dan prasarana sekolah (komputer, LCD, Perpustakaan) dan uang SPP meski siswa-siswa tidak dipungut secara penuh.

Pungutan-pungutan ini ternyata sangat memberatkan orang tua siswa. Hal ini terbukti dari banyaknya orang tua siswa yang mengeluhkan sejumlah biaya-biaya yang ditarik sekolah swasta. Keluhan-keluhan ini terasa sekali bagi orang tua mereka, khususnya mereka yang memiliki penghasilan rendah. Seperti terlihat pada tabel data cross (Tabel 14).

Data pada tabel 14 tersebut menunjukkan bahwa orang tua yang mengeluhkan pungutan-pungutan sekolah ternyata mereka yang jenis pekerjaannya wiraswasta dan buruh, yaitu, masing-masing 56.5 persen dan 34,8 persen. Sementara untuk jenis pekerjaan lain hanya berkisar 6.5 persen. Ini berarti bahwa kelompok orang tua yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta dengan penghasilan rendah lebih merasakan beban daripada pada orang tua dari kelompok PNS dan pensiunan.

Tabel 14. Cross Tab Kaitan keluhan orang tua dengan jenis pekerjaan

		Pekerjaan						Total
		Petani	PNS	Pensiunan	Wiraswasta	swasta/buruh	Lainnya	
Keluhan Orang Tua	Ya pernah	0	0	3	26	16	1	46
		.0%	.0%	6.5%	56.5%	34.8%	2.2%	100.0%
	Tidak pernah	1	2	3	55	39	4	104
		1.0%	1.9%	2.9%	52.9%	37.5%	3.8%	100.0%
Total		1	2	6	81	55	5	150
		.7%	1.3%	4.0%	54.0%	36.7%	3.3%	100.0%

Penuturan beberapa informan menunjukkan bahwa banyak orang tua masih harus membayar berbagai pungutan biaya sekolah, dan umumnya untuk menentukan biaya-biaya tersebut semuanya ditentukan secara sepihak oleh pihak sekolah. Data juga menunjukkan bahwa umumnya biaya operasional sekolah, dan bahkan gaji guru di sekolah-sekolah swasta selain dukungan memperoleh dukungan dari yayasan sekolah swasta juga berasal dari kontribusi wali murid/masyarakat.

Kenaikan jumlah nominal dana BOS ternyata tidak dirasakan oleh sekolah, terlebih lagi siswa. Akibat keterbatasan tersebut sekolah hanya mampu membeli buku di mana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah

siswa, atau membeli buku sejumlah siswa tetapi dengan kualitas buku yang rendah.

Beberapa poin penggunaan dana BOS diperuntukan bagi pengadaan sarana dan prasarana, misalnya pembelian komputer, alat tulis, atau pemeliharaan/perawatannya. Padahal, orang tua mengharapkan adanya dana BOS dapat meringankan biaya untuk membeli buku pelajaran. Kecilnya manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran boleh jadi karena keterbatasan dana yang diberikan kepada sekolah atau bisa juga karena pihak sekolah tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal ini bisa terjadi karena mekanisme

kontrol dari pemerintah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orang tua masih lemah.

### ***Peran Orang Tua***

Peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak di sekolah. Dalam juknis BOS 2014, Bab III tentang Organisasi pelaksana disebutkan bahwa orang tua menjadi salah satu anggota tim manajemen BOS sekolah. Beberapa temuan menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam ikut memutuskan tentang pelaksanaan BOS di sekolah swasta masih sangat kurang, meskipun secara umum mereka beberapa kali diundang dalam rapat-rapat BOS.

Pernyataan beberapa orang tua menunjukkan bahwa peranan orang tua khususnya dalam pengambilan keputusan pelaksanaan dana BOS oleh pihak sekolah masih sangat lemah, seperti partisipasi pendataan untuk siswa miskin di sekolah, dan penentuan kesepakatan-kesepakatan biaya yang diminta oleh pihak sekolah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kontribusi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Siswa Miskin Di Sekolah Swasta Di Jakarta Timur, secara umum bisa disimpulkan bahwa bagi pihak sekolah, keberadaan dana BOS ini telah membantu meringankan beban operasional di sekolah swasta. Sekolah swasta merasa sangat terbantu dalam penyediaan sarana dan prasarana proses belajar mengajar di sekolah swasta. Seperti penyediaan buku mata pelajaran, perangkat komputer, LCD, dan laboratorium.

Temuan menarik lain adalah bahwa meskipun sekolah swasta telah mendapat dukungan dana BOS, hampir semua sekolah yang diteliti masih menerapkan pungutan terhadap siswanya. Bagi sekolah swasta alasan untuk tetap memungut beberapa komponen biaya adalah karena dana BOS dianggap masih kurang memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan operasional sekolah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan sekolah-sekolah swasta memungut biaya

sekolah pada semua siswa, meskipun jumlah biaya ini tidak penuh.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dkk. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Diputra, G. I. Surya. 2010. *Analisis Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri Di Kota Denpasar*. Bali: Universitas Udayana.
- Hidayati, Mei. 2012. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: UNY.
- Karisun. 2009. *Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Mts Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
- Santoso, Dwi. 2009. *Keefektivan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*. Malang: UNM.
- Stamboel, Kemal A. 2012. *Panggilan Keberpihakan, Strategi mengakhiri kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Suharyo, Widjayanti I. 2005. *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: SMERU.
- Waluyo, Kiky Bagus. 2011. *Efektivitas Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan Dana BOS di SDN Pacarkeling 1 Surabaya)*. Surabaya: Airlangga.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012.
- Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2012.